

**PENGARUH *INTERNAL AUDIT* TERHADAP
AUDIT FEE DENGAN PENERAPAN *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI
VARIABEL *INTERVENING***



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

IKA KURNIA ARYANI

NIM. C2C007056

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Ika Kurnia Aryani
Nomor Induk Mahasiswa : C2C007056
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
Judul Skrip : **PENGARUH *INTERNAL AUDIT*
TERHADAP *AUDIT FEE* DENGAN
PENERAPAN *GOOD CORPORATE*
GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
*INTERVENING***
Dosen Pembimbing : Drs. Sudarno, Msi, Akt, Phd.

Semarang, 8 Maret 2011

Dosen pembimbing

Drs. Sudarno, Msi. Akt. Phd.

NIP19650520 199001 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Ika Kurnia Aryani

Nomor Induk Mahasiswa : C2C007056

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *INTERNAL AUDIT*
TERHADAP *AUDIT FEE* DENGAN
PENERAPAN *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL
*INTERVENING***

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 17 Maret 2011

Tim Penguji :

1. Drs. Sudarno, Msi., Akt. Phd. (.....)
2. Drs. H. Raharja. MSi., Akt (.....)
3. RR. Sri Handayani, SE. ,Msi., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ika Kurnia Aryani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : “**Pengaruh *Internal Audit* terhadap *Audit Fee* Dengan Penerapan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel *Intervening*”**”, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan hal ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 09 Maret
2011

Yang membuat pernyataan,

(Ika Kurnia Aryani)

NIM : C2C007056

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Pengalaman adalah guru yang terbaik (Anonim)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles)

Apabila anda berbuat baik untuk orang lain maka anda telah berbuat baik untuk diri sendiri (Benjamin Franklin)

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk:

Ayahanda dan Ibunda tercinta...

Adikku trsayang...

Keluarga, sahabat, teman, dan orang terdekat...

Terima kasih atas semangat dan kebersamaan selama ini...

^_^

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *internal audit* terhadap *audit fee* melalui penerapan *good corporate governance*. *Internal audit* yang berperan sebagai pengevaluasi kinerja perusahaan diharapkan dapat meningkatkan peringkat *corporate governance* sehingga perusahaan bersedia membayar *audit fee* yang lebih tinggi.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari website CGPI sebagai lembaga pemeringkat *corporate governance* dan *annual report* perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005-2008. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* kemudian dilakukan analisis data yang meliputi uji asumsi klasik, analisis koefisien determinasi (R^2), uji F, uji t, dan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) sebagai instrument analisis. Untuk menganalisis data menggunakan *software* SPSS versi 17.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa *internal audit* berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan *good corporate governance* dan penerapan *good corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap *audit fee* serta *internal audit* mempengaruhi *audit fee* melalui penerapan *good corporate governance*. Hal ini berarti variable penerapan *good corporate governance* merupakan variable antara (*intervening*) dari variable *internal audit* dan *audit fee*.

Kata kunci : *internal audit*, *audit fee*, *good corporate governance*.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the influence of internal audit on the audit fee, through the implementation of good corporate governance. Internal audit role as evaluators is expected to improve company performance ratings of corporate governance so that companies are willing to pay higher audit fees.

This study used secondary data taken from the website CGPI as corporate governance rating agencies and the annual report of listed companies in Indonesia Stock Exchange from the years 2005-2008. Using purposive sampling method, data analysis includes the classical assumption test, analysis of coefficient of determination (R^2), F test, t test, and using path analysis as the instrument of analysis. Analyzing data using SPSS software version 17.

Based on the results, internal audit showed that has significant positive influence to the implementation of good corporate governance and the implementation of good corporate governance has a significant positive influence on audit fees and then internal audit affect the audit fees through the implementation of good corporate governance. This means the variable implementation of good corporate governance is an intervening variable of the internal audit and audit fees.

Key words: *internal audit, audit fee, good corporate governance.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Internal Audit terhadap Audit Fee Dengan Penerapan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening”**. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak (Abdul Rochim) dan Ibu (Manis Wijayanti) yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tak pernah putus
2. Adikku (Arief Kurnia Aryanto) yang membuatku ingat untuk tetap menjadi kakak dan teladan yang baik
3. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
5. Drs. Sudarno, Msi Akt Phd selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan petunjuk serta bantuan.
6. Surya Rahardja, SE. Msi, Akt. selaku dosen wali yang selalu memberi arahan dalam perkuliahan.
7. Segenap keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
8. Kakak ketemu gede, Angga Prasetyo sebagai orang terdekat tempat berbagi suka dan duka. Terima kasih atas semua kebahagiaan dan bantuannya sampai saat ini.

9. Sahabat-sahabat terbaikku sejak bangku SMP, RA. Adi Puspa Sawitri dan Ria Andriati serta sahabat di perkuliahan Nurina, Mariani, Filka, Ria, Faris, dan Dian. Semoga kita tetap berkawan sampai tua.
10. Aliansi Kudus : Andrian, Ririn, dan Rochman. Kalian adalah motivasiku untuk terus maju.
11. Seluruh rekan-rekan Akuntansi Reguler I angkatan 2007. Semoga sukses..!!
12. Keluarga besar EECC FE Undip (Economic English Conversation Club). Dari sini aku mendapat banyak sekali teman dan pengalaman berharga.
13. Tim KKN II Kelurahan Panggung Lor Kecamatan Semarang Utara periode Juli-Agustus 2010, terima kasih atas kebersamaan tak terlupakan. Kapan kita ke posko lagi?
14. Penghuni kos Sahabat Baru 1, tempat belajar bersosialisasi dan bertoleransi dengan orang lain.
15. Pihak-pihak lain yang tidak disebutkan, terimakasih atas terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga amal baik tersebut akan mendapat Rahmat serta Karunia dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Teori Keagenan	15

2.1.2 <i>Internal Audit</i>	19
2.1.2.1 Definisi <i>Internal Audit</i>	19
2.1.2.2 Tugas dan Fungsi <i>Internal Audit</i>	19
2.1.3 <i>Good Corporate Governance</i>	22
2.1.3.1 Definisi <i>Corporate Governance</i>	22
2.1.3.2 Prinsip-Prinsip <i>Corporate Governance</i>	23
2.1.3.3 Peraturan Mengenai GCG di Indonesia	25
2.1.3.4 <i>Corporate Governance Perception Inde (CGPI)</i>	26
2.1.4 <i>Audit Fee</i>	29
2.1.5 Komitmen Independensi	24
2.2 Penelitian Terdahulu	32
2.3 Kerangka Pemikiran	33
2.4 Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian	36
3.1.1 Variabel Dependen	36
3.1.2 Variabel Independen	37
3.1.3 Variabel Intervening	37
3.2 Populasi dan Sampel	41
3.3 Jenis dan Sumber Data	39
3.4 Metode Pengumpulan Data	39
3.5 Metode Analisis Data	40

3.5.1 Statistik Deskriptif	40
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	40
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	40
3.5.2.2 Uji Multikolinearitas	41
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	42
3.5.2.4 Uji Autokorelasi.....	43
3.6 Pengujian Hipotesis.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	46
4.2 Uji Statistik Deskriptif.....	47
4.3 Uji Asumsi Klasik	48
4.3.1 Uji Normalitas.....	48
4.3.2 Uji Multikolonieritas	50
4.3.3 Uji Heterokedastisitas	51
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	53
4.4 Pengujian Hipotesis	54
4.4.1 Uji Persamaan I	54
4.4.2 Uji Persamaan II	56
4.5 Pembahasan	59
BAB V PENUTUP	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Keterbatasan	63

5.3 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Metode Pengambilan Sampel	46
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	47
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	50
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonieritas	51
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi.....	53
Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi Persamaan I	54
Tabel 4.7 Hasil Uji F Persamaan I	54
Tabel 4.8 Hasil Uji t Persamaan I	55
Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi Persamaan II	56
Tabel 4.11 Hasil Uji F Persamaan II	56
Tabel 4.12 Hasil Uji t Persamaan II.....	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	33
Gambar 3.1 Diagram path.....	44
Gambar 4.1 Grafik P-Plot Persamaan I.....	49
Gambar 4.2 Grafik P-Plot Persamaan II	49
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot Persamaan I	52
Gambar 4.4 Grafik Scatterplot Persamaan II	52
Gambar 4.5 Diagram path.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan	69
Lampiran B Data Mentah Penelitian	70
Lampiran C Hasil Statistik Deskriptif	72
Lampiran D Data Screening	73
Lampiran E Hasil Uji Normalitas	75
Lampiran F Hasil Uji Multikolonieritas	77
Lampiran G Hasil Uji Heterokesastisitas	79
Lampiran H Hasil Uji Autokorelasi	80
Lampiran I Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	81
Lampiran J Uji Statitik F (Simultan)	82
Lampiran K Uji Statistik t (Partial)	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam masyarakat yang sudah maju perekonomiannya, maka komunikasi data keuangan dan data ekonomi lainnya sangat diperlukan. Perekonomian masyarakat tersebut dicerminkan dalam bentuk organisasi badan usaha yang besar dimana para pemilik atau penanam modalnya sudah menyebar ke segala pelosok daerah dan operasinya yang sudah mejangkau secara luas bahkan sampai ke luar negeri. Para *stakeholder* atau pemangku kepentingan menghendaki diadakan pengawasan atau pengendalian terhadap perusahaan agar mereka dapat menggunakan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberi informasi yang *relevant* dan *reliable*, kegiatan audit sangat diperlukan untuk memeriksa laporan keuangan yang disajikan tersebut. Menurut *American Accounting Association Committee on Basic Auditing Concepts* (1971) :

Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertion about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertion and established criteria and communicating the result to interested users.

(Auditing adalah proses yang sistematis guna mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berkenaan dengan kegiatan dan kejadian ekonomi untuk membuktikan atau memperhatikan tingkat/sejauh mana hubungan antara kejadian

tersebut dengan kriteria-kriteria yang dikatakan dan menyampaikan hasil tersebut kepada pihak yang berkepentingan).

Agar penilaian audit terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen dilakukan secara bebas dan tidak memihak, perusahaan menggunakan jasa akuntan publik. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan memeriksa opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik, masyarakat dapat mengetahui perusahaan mana yang memiliki keadaan keuangan yang wajar dan tidak terdapat kecurangan dalam proses bisnisnya.

Karena jasa akuntan publik merupakan jasa professional, maka perusahaan harus memberikan *fee* kepada akuntan publik yang melakukan jasa audit (auditor eksternal) terhadap laporan keuangannya. Menurut Gatot (2010), pasar audit di Indonesia sangat ketat dan tidak hanya didominasi Kantor Akuntan Publik (KAP) *big four* saja. Selain itu, pasar audit di Indonesia juga masih bersifat *cost focus* dibandingkan *brand/quality focus*. Maksudnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggunakan jasa audit kebanyakan masih menggunakan pertimbangan pemilihan KAP melalui *audit fee*-nya daripada nama besar atau kualitas dari KAP tersebut.

Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi besar *audit fee*. Orang yang pertama kali memformulasikan faktor-faktor yang mempengaruhi fee audit adalah Simunic (1980). Ia membuat model yang menyatakan bahwa fee audit ditentukan oleh besar-kecilnya perusahaan yang diaudit (*client size*), risiko audit

(atas dasar *current ratio*, *quick ratio*, *D/E*, *litigation risk*) dan kompleksitas audit (*subsidiaries*, *foreign listed*). Model inilah kemudian yang dijadikan acuan untuk melihat fenomena di seputar penawaran jasa audit.

Enam belas tahun kemudian, Simunic dan Stein (1996) berpendapat bahwa proses pembentukan *audit fee* meliputi dua bagian utama:

1. Biaya sumber daya yang dikonsumsi dalam upaya untuk melakukan proses audit, dan
2. Biaya perkara yang diharapkan dari masa depan sebagai akibat dari kegagalan audit.

Menurut Haryono Jusup (2001:104), besarnya *audit fee* dapat bervariasi tergantung antara lain risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya. Kompleksitas jasa yang dimaksud adalah kompleksitas perusahaan menyangkut banyaknya anak perusahaan dan jumlah karyawan. Semakin kompleks klien, semakin sulit untuk mengaudit dan membutuhkan waktu yang lebih lama pula sehingga *audit fee* pun semakin tinggi (Hay et al., 2006). Kualitas laporan keuangan juga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya *audit fee* (Chanegem, 2009).

Selain faktor-faktor tersebut di atas, terdapat hal lain yang dapat mempengaruhi *audit fee*, yaitu *internal audit*. *Internal audit* sangat diperlukan bagi organisasi yang membutuhkan informasi dari pihak yang independen mengenai berbagai aktivitas organisasi guna pengambilan keputusan yang lebih obyektif dan *accountable*. *Internal audit* juga berfungsi untuk mengendalikan

jalannya organisasi karena *internal auditor* bertugas mengevaluasi kinerja pihak yang diaudit guna mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan, baik penyimpangan yang bersifat kepatuhan (*compliance*), inefisiensi, kecurangan (*fraud*), aktivitas, operasi, atau pekerjaan yang tidak efektif, serta laporan keuangan yang tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya.

Adanya *internal audit* bisa menghindari resiko terjadinya kerugian karena tidak adanya kontrol dari pihak yang independen atau karena pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang tidak obyektif. Dalam hal implementasi QMS ISO 9001, system manajemen mutu ISO 9001, atau EMS ISO 14001 maupun system manajemen lingkungan ISO 14001, keberadaan *internal audit* bukan lagi merupakan pertimbangan atau kebutuhan manajemen, melainkan suatu kewajiban. Keberadaan *internal audit* sudah menjadi salah satu ketentuan persyaratan standar internasional, sehingga memang harus ada sebagai bagian dari proses "*Checking*" atau pengawasan jalannya system manajemen, baik QMS ISO 9001 atau pun EMS ISO 14001.

Paradigma yang berkembang dalam *internal audit* dapat dibagi dalam tiga paradigma dominan (McNamee:1998). Pertama, paradigma *internal audit* yang focus pada observasi dan hitungan (*reperformance*). Sejak lama *internal audit* disamakan dengan menghitung dan mengobservasi item fisik atau angka yang merepresentasikan item tersebut. Paradigma kedua dikenalkan oleh Brink (1941, dalam McNamee:1998) bahwa auditor internal fokus pada kontrol. Paradigma ketiga didasarkan pada audit proses bisnis melalui fokus pada risiko. Adanya perbedaan paradigma dan *internal auditor* akan menghasilkan kesimpulan yang

berbeda dari suatu data yang sama. Paradigma yang tidak cocok akan menimbulkan ketidakefektifan audit intern dalam organisasi.

Tanggung jawab keefektifan audit internal dipegang oleh Komite Audit. Setiap *internal audit* melakukan perencanaan atau pelaporan, maka hasilnya akan dievaluasi oleh Komite Audit. Selanjutnya akan dilaporkan ke dewan komisaris agar komisaris memberi petunjuk dewan direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan.

Komite audit mengadakan rapat-rapat bersama auditor internal dan membahas hasil temuan audit, efektivitas pengendalian internal, dan cakupan audit oleh auditor internal dan eksternal.

Secara tradisional, fungsi *internal audit* yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan dan membantu menghasilkan informasi akuntansi yang handal untuk pembuatan keputusan tujuan (Gay dan Simnett, 2007). Baru-baru ini, metamorfosa *internal audit* menyertakan, antara lain kawasan, manajemen risiko dan kepastian TI jasa (Spira dan Page, 2003). Hasil studi baru-baru ini oleh Goodwin-Stewart dan Kent (2006) ditemukan bahwa terdapat hubungan di antara *internal audit* dan *audit fee*. Berdasarkan data tahun 2000, mereka melakukan pemeriksaan yang mendukung pada hubungan yang signifikan antara *internal audit* dan *audit fee*. Francis dalam Goodwin-Stewart et al. (2006) menyatakan bahwa *audit fee* yang tinggi menyatakan kualitas audit yang lebih baik.

Penelitian Goodwin-Stewart dan Kent (2006) diperluas oleh Singh dan Newby (2009) dengan menggunakan data tahun 2005 yang terkumpul hanya dari

laporan tahunan (yaitu informasi publik). Dua penelitian tersebut menemukan secara konsisten menemukan bahwa keberadaan fungsi *internal audit* secara signifikan positif berkaitan dengan *audit fee* suatu perusahaan.

Memahami sifat hubungan antara *internal audit* dan *audit fee* merupakan hal yang penting, karena memiliki implikasi ekonomi bagi perusahaan-perusahaan dan auditor eksternal, terutama mengingat bahwa auditor internal dan eksternal berfungsi sebagai mekanisme pemantauan perusahaan (Felix et al., 2001; Goodwin-Stewart dan Kent, 2006, Stein et al 1994.,). Oleh karena itu, auditor dan perusahaan klien mereka harus memiliki kesesuaian cara penggunaan sumber daya internal dan eksternal audit selama proses audit.

Namun, terjadi perkembangan dalam peran *internal audit* yaitu dari sekedar unit yang mengecek kepatuhan, menjadi sebuah fungsi yang berperan aktif sebagai mitra bagi manajemen dalam mendukung penerapan GCG dengan melakukan evaluasi dan perbaikan proses kerja perusahaan yang berpengaruh pada penerapan nilai perusahaan dan terjaganya akuntabilitas; membantu menjaga efektivitas pengendalian dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi serta memberikan input untuk perbaikan yang berkesinambungan; serta melakukan identifikasi dan evaluasi risiko signifikan yang dihadapi perusahaan dan memberikan masukannya untuk perbaikan sistem pengendalian dan manajemen risiko.

Menurut Daniri, *internal audit* merupakan bagian dari praktik *Good corporate governance* (GCG), juga praktik manajemen, dimana didalamnya mencakup pengawasan yang memadai, etika bisnis, independensi, pengungkapan

yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan perusahaan, serta mekanisme untuk memastikan adanya tindak lanjut yang seksama jika terjadi pelanggaran dalam perusahaan. Seperti terdapat dalam penelitian Muhammadinah (2010), audit internal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan *good corporate governance* di PT. Pertamina.

Padahal faktor *corporate governance* terutama struktur *corporate governance* juga berpengaruh terhadap *audit fee*. Seperti dalam penelitian Yatim et al., (2006) bahwa struktur *corporate governance* seperti komite audit dan frekuensi rapat komite memiliki hubungan positif dan signifikan. Demikian pula penelitian Carcello et al (2002) dan Abbott et al (2003) menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur *corporate governance* lebih kuat menimbulkan permintaan kualitas audit yang lebih tinggi dan dengan demikian akan bersedia membayar *audit fee* lebih tinggi.

Penelitian mengenai struktur GCG di Indonesia sudah sangat banyak sehingga penelitian ini akan meneliti tentang penerapan atau implementasi GCG itu sendiri. Manajemen mengimplementasikan GCG bertujuan untuk menambah dan memaksimalkan nilai perusahaan, selain itu GCG diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh.. Penerapan GCG pada perusahaan – perusahaan di Indonesia ditunjukkan dalam peneringkatan *Corporate governance Perception index* (CGPI). Program CGPI akan memberikan apresiasi dan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang telah

menerapkan GCG melalui CGPI Awards dan penobatan sebagai Perusahaan Terpercaya.

Terdapat dua pandangan terhadap hubungan antara *internal audit*, *corporate governance*, serta audit eksternal yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap *audit fee*. Pandangan pertama adalah apa yang disebut sebagai control pengganti (substitution control view) yang menyatakan bahwa hubungan antara audit eksternal dan sumber-sumber pengendalian atau control yang ada saling menggantikan. Misalnya *internal audit*, didasarkan pada asumsi bahwa keputusan terhadap pengurangan risiko mencerminkan penggantian atau substitusi yang potensial suatu pengendalian terhadap pengendalian yang lain. Sebagai contoh, penelitian Simunic (2006) menyatakan bahwa auditee dapat mengganti audit eksternal dengan *internal audit* ketika terdapat pengetahuan untuk mengurangi biaya audit eksternal serta menyimpulkan bahwa *internal audit* yang baik akan mengurangi pekerjaan audit eksternal.

Pandangan kedua adalah apa yang disebut control tambahan (complementary control view) yang menyatakan bahwa hubungan antara pengendalian atau control, *corporate governance*, dan auditing saling melengkapi dan bukan saling menggantikan serta penambahan terhadap suatu komponen pengendalian akan menguatkan komponen pengendalian yang lain. Penelitian Goodwin-Steward (2006) menguatkan pandangan ini dengan menemukan adanya hubungan yang positif antara keberadaan fungsi *internal audit* dan peningkatan permintaan terhadap audit eksternal yang menyebabkan peningkatan terhadap *audit fee*.

Dalam control pengganti (substitution control view), penambahan dalam suatu sumber control atau pengendalian akan mengurangi fungsi pengenalan yang lain, sehingga akan mengakibatkan hubungan yang negative antara pengendalian, *corporate governance*, dan audit eksternal. Apabila control pengganti (substitution control view) diterapkan, maka pengendalian yang ada akan menggantikan satu sama lain dan akan terdapat hubungan yang negative antara mekanisme-mekanisme pengendalian yang ada.

Temuan empiris yang menunjukkan hubungan negative antara *internal audit*, *corporate governance*, dan *audit fee* dapat terjadi, misalnya, di mana *internal auditor* internal terlibat dalam pelaksanaan aktual dari audit eksternal, bekerja di bawah arah atau bahkan pengawasan langsung auditor eksternal. Atau, hubungan negative antara *internal audit* dan eksternal audit biaya bisa timbul dari penilaian yang lebih rendah risiko audit karena *internal audit* untuk terlibat dalam memperkuat kontrol dalam organisasi (Felix et al., 2001; Turpin, 1990; Wallace, 1984).

Beberapa pekerjaan yang dilakukan auditor internal secara langsung relevan bagi pekerjaan auditor independen (Messier et. Al, 2006). Sebagai contoh, auditor independen kadangkala dapat memanfaatkan pekerjaan yang dilakukan auditor eksternal. Sebelum mengandalkan pekerjaan auditor internal, auditor independen harus mengevaluasi objektifitas dan kompetensi auditor internal. Jika auditor independen memutuskan bahwa mereka dapat mengandalkan sebagian pekerjaan auditor internal, bisa terjadi penghematan yang signifikan dalam biaya audit eksternal (*audit fee*)

Sebaliknya, dalam control tambahan (*complementary control view*), penambahan dalam suatu sumber pengendalian akan menambah fungsi yang lain. Dalam pandangan ini dewan komisaris dengan kewajiban yang dimiliki dan mengakibatkan permintaan terhadap audit eksternal akan bertambah dengan tujuan agar reputasi mereka tetap terjaga yang akan berkonsekuensi pada penambahan *audit fee*. Dalam penelitian terhadap pandangan ini Hay et al. (2008) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara dewan komisaris independen dan *fee* yang dibayarkan kepada auditor di New Zealand.

Hubungan komplementer ini semakin kuat setelah muncul kasus *Enron* dan *Arthur Andersen*. Dalam *Sarbanes-Oxley Act section 302- Corporate Responsibility for Financial Reports* disebutkan adanya peranan yang besar dari *internal audit* untuk memfasilitasi proses pengendalian risiko bisnis. *Internal auditor* harus memberikan informasi yang cukup terhadap eksternal auditor mengenai laporan keuangan perusahaan. SOX menghendaki bahwa *internal audit* bukan struktur pelengkap semata namun lebih dari itu dapat diharapkan peranannya agar perusahaan dapat beroperasi secara sehat dan handal.

Hasil penelitian yang menunjukkan hubungan positif signifikan antara *internal audit* dan *audit fee* dan menyarankan bahwa *internal audit* dan audit eksternal dapat dianggap sebagai pelengkap, yaitu sarana meningkatkan pemantauan secara keseluruhan dalam sebuah organisasi. Hal ini konsisten dengan peran lebih luas dari *internal audit* secara global yang telah berkembang dari fokus sempit pada pengendalian untuk lebih memperhatikan risiko

manajemen dan prinsip *good corporate governance* (Hay et al., 2008; Goodwin-Stewart dan Kent, 2006; Hayland dan Verrault, 2003; Spira dan Page, 2003).

Pemeriksaan hubungan antara *internal audit* dan *audit fee* penting mengingat saat ini fokus yang kuat pada *good corporate governance* harus peduli dengan bagaimana internal dan audit eksternal meningkatkan integritas pelaporan keuangan (*Goodwin-Stewart dan Kent, 2006; dan Page Spira, 2003*). Penelitian ini penting bagi mereka yang mengelola perusahaan dan bagi perusahaan audit, terutama mengingat banyaknya perusahaan yang runtuh sehubungan dengan masalah dengan kualitas laporan keuangan dan dengan praktek-praktek audit seperti kasus *Enron* dan *Arthur Andersen*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka *Internal audit* berpengaruh terhadap Penerapan *Good corporate governance* dan Penerapan *Good corporate governance* juga mempengaruhi *Audit fee* sehingga penulis mengambil judul **“PENGARUH INTERNAL AUDIT TERHADAP AUDIT FEE DENGAN PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini bermaksud menguji pengaruh efektifitas fungsi *internal audit* terhadap besar *audit fee* yang dibayarkan perusahaan dengan penerapan *good corporate governance* yang diukur melalui *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*. Maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *internal audit* berpengaruh terhadap penerapan GCG?
2. Apakah penerapan GCG berpengaruh terhadap *audit fee*?
3. Apakah *internal audit* berpengaruh tidak langsung melalui penerapan *good corporate governance* terhadap *audit fee*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh fungsi *internal audit* terhadap besar *audit fee* yang dibayar perusahaan
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh fungsi *internal audit* terhadap besar *audit fee* yang dibayarkan perusahaan dengan sebagai penerapan (komitmen) *good corporate governance* variabel *intervening*

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bukti empiris mengenai *internal audit* dan penerapan GCG serta faktor kontijensi yang mempengaruhi *audit fee*

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pihak manajer bahwa *internal audit* dan penerapan *good corporate governance* di perusahaan merupakan factor yang mungkin

berpengaruh dalam menentukan besar *audit fee* karena sangat menentukan integritas laporan keuangan yang dibuat.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan menyediakan informasi terkait *internal audit* dan CGC dalam hubungannya dengan *audit fee*.

1.4 Sistematika Penulisan

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan gambaran singkat dari isi penelitian yang diantaranya mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang menjadi sumber terbentuknya suatu hipotesis, sekaligus sebagai acuan untuk melakukan penelitian, yang terdiri dari Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Penelitian, dan Hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan secara mendetail mengenai metode yang digunakan dalam penelitian meliputi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel, Penentuan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi Deskripsi Objek Penelitian, Analisis Data, serta Interpretasi Hasil sebagai pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dipaparkan Simpulan peneliti, Keterbatasan, serta Saran untuk penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976 dan menyatakan bahwa *agency theory* merupakan ketidaksamaan kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Teori ini membahas tentang hubungan keagenan di mana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*". *Principal* disini yaitu orang yang memberi wewenang atau pemegang saham sedangkan *agent* adalah manajer.

Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989 dalam Widiyanti, 2009). Pertama, adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi prinsipal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah prinsipal tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua, adalah

masalah pembagian risiko yang timbul pada saat prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda yang dikarenakan adanya perbedaan preferensi terhadap risiko.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai *principal* diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen disumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Perbedaan "*kepentingan ekonomis*" ini bisa saja disebabkan ataupun menyebabkan timbulnya informasi asimetri (kesenjangan informasi). Yaitu ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lainnya, *asymmetric information* terdiri dari dua tipe, yang pertama adalah *adverse selection*. Pada tipe ini, pihak yang merasa memiliki informasi lebih sedikit dibandingkan pihak lain tidak akan mau untuk melakukan perjanjian, dia akan membatasi dengan kondisi yang sangat ketat dan biaya yang sangat tinggi. Tipe yang kedua adalah *moral hazard*. *Moral hazard* ini terjadi kapanpun manajer melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pemilik untuk keuntungan pribadinya dan menurunkan kesejahteraan pemilik.

Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Principal menginginkan pengembalian yang sebesar2nya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang dimiliki.

Agen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi/bonus/insentif/remunerasi yang “memadai” dan sebesar2nya atas kinerjanya. Principal menilai prestasi Agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Makin tinggi laba, harga saham dan makin besar deviden, maka Agen dianggap berhasil/berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi.

Sebaliknya Agen pun memenuhi tuntutan Principal agar mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka sang Agen dapat memainkan beberapa kondisi perusahaan agar seolah2 target tercapai. Permainan tersebut bisa atas prakarsa dari Principal ataupun inisiatif Agen sendiri. Maka terjadilah *Creative Accounting* yang menyalahi aturan, misal: adanya piutang yang tidak mungkin tertagih yang tidak dihapuskan; Capitalisasi expense yang tidak semestinya; Pengakuan penjualan yang tidak semestinya; yang kesemuanya berdampak pada besarnya nilai aktiva dalam Neraca yang “mempercantik” laporan keuangan walaupun bukan nilai yang sebenarnya. Atau bisa juga dengan melakukan *income smoothing* (membagi keuntungan ke periode lain) agar setiap tahun kelihatan perusahaan meraih keuntungan, padahal kenyataannya merugi atau laba turun.

Pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya pengawasan ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency cost*. Aktivitas pengawasan dapat

berupa kontrak perjanjian yang di buat antara prinsipal dan agen. Sedangkan *agency cost* itu sendiri adalah ongkos atau resiko yang terjadi ketika seseorang (*principal*) membayar seseorang (*agent*) untuk menjalankan sebuah tugas, padahal kepentingan *agent* bertentangan atau tidak selaras dengan kepentingan *principal*.

The Cadbury Committee (1992) menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan dalam perusahaan menimbulkan *corporate governance* yang dinyatakan sebagai sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Mekanisme yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah agensi atau perbedaan kepentingan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Good Corporate Governance* merupakan bentuk pengelolaan perusahaan, yang didalamnya tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana ekstern. Sistem *corporate governance* yang baik akan memberikan perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh kembali investasi dengan wajar, tepat, dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan perusahaan.

Target kontrol *corporate governance* adalah kontrol terhadap perusahaan yang diarahkan pada pengawasan perilaku manajer. Kontrol tidak diarahkan pada pengekangan kreatifitas dan potensi manajemen, tetapi lebih diarahkan pada upaya mengarahkan pengelolaan perusahaan yang terbuka (*transparent*) dan yang bisa dipertanggungjawabkan (*accountable*) serta terdapat proses *monitoring*.

2.1.2 Internal Audit

2.1.2.1 Definisi Internal Audit

The Institute of Internal Auditors (2000) memberikan definisi bahwa :

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

Internal audit adalah aktivitas independen, keyainan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menmbah nilai dan eningkatkan operasi organisasi. Internal Auidt ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemn resiko, pengendalian dan proses tata kelola.

2.1.2.2 Tugas dan Fungsi Internal Audit

Fungsi internal audit merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka (Mulyadi, 2002). Tugas fungsi internal audit adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi.

Audior yang melakukan tugas internal audit disebut auditor internal. Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah dipatuhi, menentukan baik tidaknya penjagaan terhadap

kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan kualitas informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi (Mulyadi dan Puradiredja, 1998). Maknanya bahwa internal auditor secara independen memberikan suatu jasa konsultasi mengenai seluruh aspek risiko yang melekat pada bisnis perusahaan yang artinya seluruh level manajemen perlu menjadi perhatian auditor intern.

Institute of Internal Auditors dalam Boynton and Kell (1996) telah menetapkan lima standar praktik pemeriksaan yang mengikat anggota - anggotanya, yang meliputi masalah independensi, keahlian profesional, lingkup kerja pemeriksaan, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan, dan pengelolaan bagian pemeriksaan intern. Norma Pemeriksaan intern tersebut merupakan indikator yang menentukan kualitas jasa auditor internal dalam melaksanakan praktik pemeriksaan. Kalau dikaitkan dengan tugas auditor internal yang melakukan penilaian atas efektivitas pengendalian intern perusahaan, semakin lengkap indikator tersebut dipatuhi oleh auditor internal, semakin berkualitaslah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal dan semakin meningkatlah pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, auditor intern memiliki kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan dan penilaian terhadap efektifitas pengendalian intern yang efektif dengan biaya yang minimum.
2. Menentukan sampai berapa jauh pelaksanaan kebijakan manajemen puncak dipatuhi.

3. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian
4. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian dalam perusahaan
5. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan – kegiatan perusahaan

Hasil-hasil audit dan rekomendasi harus dilaporkan kepada Presiden Direktur dan Komite Audit untuk ditindaklanjuti. Peran Komite Audit disini adalah mengawasi pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal atau internal Audit. Komite audit memeriksa kualitas dari auditor internal dan mendiskusikannya bersama manajemen agar terwujud efektifitas kerja.

Dengan keberadaan fungsi internal audital yang efektif, dapat tercipta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan efektif, dan pengendalian yang ada dalam perusahaan dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan terpercaya (Mulyadi, 2002). Internal audit juga dapat menjadi barometer standar perilaku yang berlaku di perusahaan melalui aktivitas pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan, yang mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien. Seiring dengan perbaikan dalam proses internal tersebut, keyakinan investor (termasuk kreditur) terhadap proses pengelolaan perusahaan juga akan meningkat.

2.1.3 *Good Corporate governance*

2.1.3.1. Definisi *Corporate governance*

Kata *corporate governance* terdiri dari 2 kata, yaitu *corporate* yang berarti perusahaan dan *governance* dari kata gubernare berarti to steer, mengendalikan, memberi arahan. Secara kasar, *corporate governance* berarti tata kelola perusahaan.

Konsep *Corporate governance* menurut *The Indonesian Institute of Corporate governance (IICG)* dapat didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sedangkan pengertian GCG dari segi soft definition menurut BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), yaitu “komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika”.

Good Corporate governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Baik (*Good*) adalah tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan dan keteraturan operasional perusahaan sesuai dengan konsep CG. Sistem adalah prosedur formal dan informal yang mendukung struktur dan strategi operasional dalam suatu perusahaan Proses adalah kegiatan

mengarahkan dan mengelola bisnis yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat, serta mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham. Struktur *corporate governance* adalah

1. Susunan atau rangka dasar manajemen perusahaan yang didasarkan pada pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab di antara organ perusahaan (dewan komisaris, direksi dan RUPS/pemegang saham) dan *stakeholder* lainnya, dan
2. Aturan-aturan maupun prosedur-prosedur untuk pengambilan keputusan dalam hubungan perusahaan.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa GCG tersebut merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Para *Stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem pengawasan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang, yaitu pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, berikut pengukuran kinerjanya

2.1.3.2 Prinsip-prinsip *Corporate governance*

Organization for economic Co-operation and Developmen(OECD)

menguraikan empat prinsip dalam *corporate governance*, yaitu :

a. *Fairness* (keadilan)

Fairness menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Prinsip *fairness* diharapkan untuk membuat seluruh asset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*) sehingga terdapat perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham serta *fair* (jujur dan adil). Penegakan prinsip *fairness* mensyaratkan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten, dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif.’

b. *Transparency* (transparansi)

Transparency mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat dibandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Prinsip *transparency* diharapkan dapat membantu stakeholder dalam menilai risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan serta meminimalisasi adanya benturan kepentingan (*conflicy of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

c. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip *accountability* menjelaskan peran dan tanggungjawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi dewan komisaris. Beberapa bentuk implementasi dari *accountability* adalah

adanya praktek internal audital yang efektif serta kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab dalam anggaran dasar perusahaan dan *Statement of Corporate Intent* (target pencapaian perusahaan di masa depan).. Apabila prinsip *accountability* diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab antara pemegang saham, komisaris, serta direksi.

d. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

Responsibility memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan diatuhinya nilai-nilai sosial. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negative yang harus ditanggung masyarakat.

2.1.3.3 Peraturan mengenai *Good Corporate governance* di Indonesia

GCG di Indonesia secara implisit maupun eksplisit telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, sehingga implementasi prinsip-prinsip GCG di Indonesia salah satunya telah didorong oleh kepatuhan terhadap regulasi. Ada beberapa produk hukum dan peraturan-peraturan dari lembaga-lembaga terkait (seperti BEI, BAPEPAMLK, dll) yang mengatur pelaksanaan GCG di Indonesia. Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 diantaranya telah memperhatikan perkembangan terkini dunia usaha dan juga memperhatikan praktik GCG sebagai nilai dan konsep yang terkandung dalam undang-undang

tersebut. Selain itu skema pelaksanaan GCG di perusahaan publik (emiten) yang terdaftar pada BEI juga tunduk pada aturan BAPEPAMLK dan BEI.

Di sektor perbankan, Bank Indonesia telah mempunyai Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate governance* di Bank Umum, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006. Salah satu bentuk implementasi dari peraturan tersebut Bank Indonesia telah melaksanakan rating dan assessment pelaksanaan GCG (*self assessment*) di seluruh bank yang berada di bawah pengawasannya pada tahun 2007.

Untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Negara BUMN berperan sebagai pengawas pelaksanaan GCG berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor. KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peraturan Bank Indonesia dan Keputusan Menteri BUMN tersebut telah cukup lengkap mengatur tentang kewajiban pelaksanaan GCG di perbankan dan BUMN.

2.1.3.4 *Corporate governance Perception Index (CGPI)*

Corporate governance Perception Index (CGPI) adalah program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. CGPI diikuti oleh Perusahaan Publik (Emiten), BUMN, Perbankan dan Perusahaan Swasta lainnya. Program CGPI secara konsisten telah diselenggarakan pada setiap tahunnya sejak tahun 2001. CGPI diselenggarakan oleh IICG sebagai lembaga swadaya masyarakat independen bekerjasama dengan Majalah SWA sebagai

mitra media publikasi. Program ini dirancang untuk memicu perusahaan dalam meningkatkan kualitas penerapan konsep CG melalui perbaikan yang berkesinambungan (*continous improvement*) dengan melaksanakan evaluasi dan melakukan studi banding (*benchmarking*). Program CGPI akan memberikan apresiasi dan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan CG melalui CGPI Awards dan penobatan sebagai Perusahaan Terpercaya. Penghargaan CGPI Awards dan hasilnya dipaparkan di Majalah SWA salam Sajian Utama.

IICG melalui program CGPI membantu perusahaan meninjau ulang pelaksanaan CG yang telah dilakukannya dan membandingkan pelaksanaannya terhadap perusahaan-perusahaan lain pada sektor yang sama. Hasil tinjauan dan perbandingan ini akan memberikan manfaat berikut kepada perusahaan: Perusahaan dapat membenahi faktor-faktor internal organisasinya yang belum sesuai dan belum mendukung terwujudnya GCG berdasarkan hasil temuan selama survey CGPI berlangsung.

Kepercayaan investor dan publik meningkat terhadap perusahaan karena adanya hasil publikasi IICG tentang pelaksanaan konsep CG yang dilakukan perusahaan. Peningkatan kesadaran bersama di kalangan internal perusahaan dan *stakeholders* terhadap pentingnya GCG dan pengelolaan perusahaan kearah pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemetaan masalah-masalah strategis yang terjadi di perusahaan dalam penerapan GCG sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang diperlukan. CGPI dapat dijadikan sebagai indikator atau standar mutu yang ingin dicapai perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat

terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG. Perwujudan komitmen dan tanggungjawab bersama serta upaya yang mendorong seluruh anggota organisasi perusahaan untuk menerapkan GCG.

Pentahapan atau urutan proses riset dalam pemeringkatan penerapan GCG (untuk kedua pilihan tema) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Self-assessment*

Pada tahap ini Perusahaan diminta mengisi kuesioner *Self-assessment* seputar penerapan konsep CG di perusahaannya.

b. Pengumpulan Dokumen Perusahaan

Pada tahap ini Perusahaan diminta untuk mengumpulkan dokumen dan bukti yang mendukung penerapan CG di perusahaannya. Bagi perusahaan yang telah mengirimkan dokumen terkait pada penyelenggaraan CGPI tahun sebelumnya boleh memberikan pernyataan konfirmasi padadokumen sebelumnya (kecuali jika terjadi perubahan, maka revisi harus dilampirkan)

c. Penyusunan Makalah dan Presentasi

Pada tahap ini Perusahaan diminta untuk membuat penjelasan kegiatan perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam proses manajemen stratejik selama tahun 2008 dalam bentuk makalah dengan memperhatikan sistematik penyusunan yang telah ditentukan.

d. Observasi ke perusahaan

Pada tahap ini tim peneliti CGPI 2008 akan berkunjung ke lokasi Perusahaan peserta untuk menelaah kepastian penerapan prinsip-prinsip GCG dan proses manajemen stratejik

2.1.4 *Audit fee*

DeAngelo dalam Rizkiasih (2010) menyatakan bahwa *audit fee* merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor dalam penugasan audit seperti, ukuran perusahaan klien, kompleksitas jasa audit yang dihadapi auitor, risiko audit yang dihadapi auditor dari klien, serta nama KAP yang melakukan jasa audit.

Lebih lanjut menurut Sankaraguruswamy et al. dalam Rizkiasih (2010) *audit fee* merupakan pendapatan yang besarnya bervariasi tergantung beberapa faktor dalam penugasan audit seperti : keuangan klien (*financial of client*), ukuran perusahaan (*client size*), ukuran auditor dan KAP, keahlian yang dimiliki auditor tentang industry (*industry expertise*), serta efisiensi yang dimiliki auditor (*technological efficiency of auditors*).

Simunic (2006) menyatakan bahwa *audit fee* ditentukan oleh besar kecilnya perusahaan yang diaudit, risiko audit (atas asar *current ratio*, *quick ratio*, *D/E*, *litigation risk*), dan kompleksitas audit (*subsidiaries*, *foreign listed*). Al-Harshani dari Kuwait dalam Widiyasari (2009) juga melakukan penelitian yang

sama ditambah variable ratio profitabilitas dan menunjukkan hasil yang signifikan.

Pada tanggal 2 Juli 2008 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP. 024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan *Audit fee*. Surat Keputusan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan bagi profesi Akuntan Publik maupun Kantor Akuntan Publik dalam menetapkan *audit fee*.

Dalam bagian Lampiran 1 Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan *Audit fee* dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktek sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan auditor atau akuntan lain, akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi Anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku.

Undang-undang juga termasuk faktor yang berkontribusi terhadap besar *audit fee* seperti dalam penelitian Ibrahim (2009) yang menunjukkan pergeseran signifikan dalam *audit fee* selama awal ditetapkannya *Sarbanes-Oxley* (SOX).

Sedangkan masalah KAP Big-4 dan non Big-4 lebih dalam diteliti oleh Van Caneghem (2009) yang menemukan bahwa KAP Big-4 memiliki struktur *audit fee* lebih tinggi karena lebih banyak memperhatikan variable-variabel dalam menentukan biaya audit mereka.

Sedangkan menurut Supriyanta (2007), factor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya *audit fee* adalah :

1. Besar kecilnya auditee.

Jelas masalah ini menjadi krusial jika ketika kita banyak melihat yayasan ataupun organisasi nirlaba yang memerlukan jasa audit namun kondisi keuangannya minim.

2. Lokasi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Biaya overhead Kantor Akuntan Publik di daerah secara umum lebih kecil dibandingkan dengan biaya overhead di ibukota

3. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Ketika dikaitkan dengan besar kecilnya kantor, kantor yang berdomisili di kota besar akan memiliki standar gaji yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan KAP yang terletak di kota pinggiran.

Faktor-faktor diatas sangat berpengaruh terhadap penentuan *audit fee* yang akan dibebankan KAP kepada kliennya. Faktor lain seperti berapa target profit yang akan didapatkan owner jelas sangat besar pengaruhnya juga. Sampai saat ini masih sulit mencari kesepakatan berapa nilai *audit fee* yang mesti diberlakukan. Jika ditetapkan mengenai *audit fee* minimal diberlakukan, maka organisasi yang memiliki sumber daya keuangan terbatas sulit untuk mendapatkan jasa audit. Begitu

pula KAP yang akan menyumbangkan jasa yang dimiliki untuk kemajuan organisasi nirlaba akan terhambat dengan ketentuan besar *audit fee* tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Singh dan Newby (2009) meneliti mengenai hubungan antara fungsi internal audit dan *external audit fee* dan menemukan ada hubungan yang positif signifikan. Penelitian ini memperluas dari penelitian *Goodwin-Stewart* dan *Kent* (2000) tetapi menggunakan informasi data yang telah dipublikasikan. Studi ini hanya mencakup 300 perusahaan terbesar sehingga tidak dapat digeneralisasi ke perusahaan yang lebih kecil.

Hubungan mengenai karakteristik Komite Audit dan external audit fees diteliti oleh Yatim et al. (2006) dan menghasilkan hubungan yang positif dan signifikan. Menggunakan uji regresi berganda untuk menganalisis 736 perusahaan terdaftar di Bursa Malaysia. Akan tetapi hasil ini tidak berlaku perusahaan yang dimiliki pemerintah Malaysia (BUMIPUTERA) atau yang di Indonesia dikenal dengan nama BUMN.

Sedangkan Indriyani dan Muhammadiyah (2010) meneliti pengaruh kualitas *internal audit* terhadap pelaksanaan *good corporate governance* pada PT. Pertamina. Menggunakan analisis regresi linier sederhana dan menyatakan bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap peningkatan *good corporate governance* di PT. Pertamina. Audit internal yang dilaksanakan di PT Pertamina telah memadai hal ini dapat dilihat dari independensi, kompetensi, program audit,

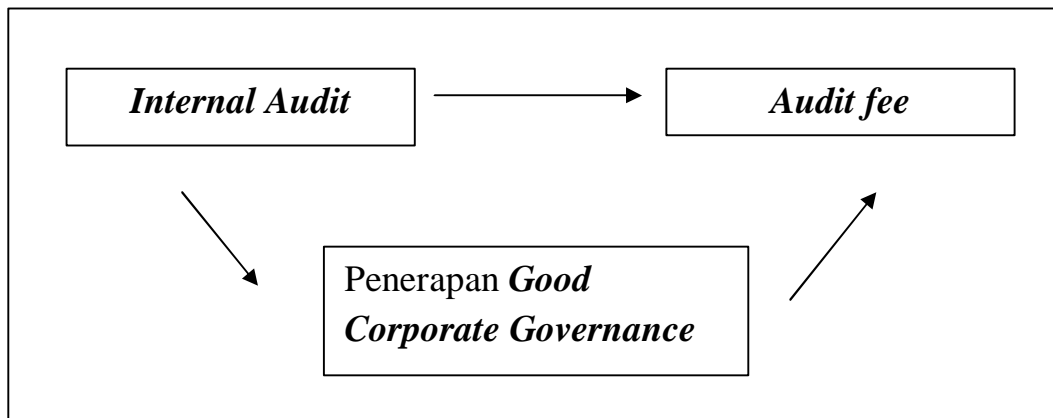
pelaksanaan audit, laporan hasil audit dan tindak lanjut audit yang dilaksanakan sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku

2.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis faktor adanya fungsi internal audit untuk mengetahui pengaruhnya terhadap *audit fee* yang dibayarkan perusahaan pada auditor independen.. Selain itu, penerapan *good corporate governance* juga memediasi hubungan kedua faktor tersebut. Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini nampak pada gambar :

Gambar 2.1

Kerangka Penelitian



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu proposisi atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan/pemecahan masalah

ataupun untuk dasar penelitian lebih lanjut (Supranto, 1993). Hipotesis berperan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dan membantu peneliti membuat rancangan kesimpulan.

2.4.1 Internal Audit dan Penerapan Good Corporate Governance

Dalam meningkatkan good corporate governance suatu perusahaan memerlukan peran auditor internal (Muhammadinah, 2010). Auditor internal bertugas meneliti dan mengevaluasi suatu system akuntansi serta menilai kebijakan dan program kerja manajemen yang dilaksanakan. Auditor internal merupakan salah satu profesi yang menunjang peningkatan GCG, yang pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien.

Profesi audit internal mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sedangkan keberadaan audit internal diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan sebagai fungsi yang independen dalam menciptakan sikap profesional dalam setiap aktivitasnya, sehingga mendorong pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian terhadap profesi ini.

H1 = *Internal Audit* berpengaruh terhadap *Penerapan Good Corporate Governance*

2.4.2 Penerapan Good Corporate Governance dan Audit Fee

Menurut penelitian Yatim et al. (2006), struktur corporate governance berpengaruh positif dengan audit fee eksternal. Selain itu Carcello et al. (2000) dalam “*Board Characteristics and Audit Fees*” menguji pengaruh antara karakteristik dewan dalam perusahaan dengan *fee* yang dibayarkan untuk auditor eksternal. Penelitian ini menggunakan sampel dari *Fortune 1000 Companies* dan menggunakan analisis OLS untuk menguji hipotesisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif antara *board independence, diligence and expertise* dan *fee audit*.

H2 = Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Audit Fee*

2.4.3 Internal Audit dan Audit Fee

Apabila suatu perusahaan memiliki fungsi internal audit dalam mekanisme operasionalnya, maka perusahaan tersebut akan rela mengeluarkan *audit fee* lebih besar demi kualitas laporan keuangan yang dapat dipercaya. Seperti terdapat dalam penelitian Singh dan Newby (2009) bahwa

H3 = Penerapan *Internal Audit* berpengaruh terhadap *Audit Fee* melalui Penerapan *Good Corporate Governance*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti, mempunyai variasi antara yang satu dan yang lain dalam kelompok tersebut yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Dalam penelitian ini digunakan 3 variabel yaitu *audit fee* (Y) sebagai variabel dependen, internal audit (X) sebagai variabel independen, dan penerapan *Good Corporate Governance* sebagai variabel intervening.

Definisi Operasional adalah penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan konstruk, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran konstruk yang lebih baik (Indriantoro dan Supomo, 2002).

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *audit fee*. Data tentang *audit fee* akan diambil dari akun *professional fees* yang terdapat dalam laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Eek Indonesia

(BEI). Data mengenai *audit fee* belum banyak ditemukan di Indoensia karena kebanyakan perusahaan dalam mengungkapkan *audit fee*-nya masih berupa voluntary disclosure, sehingga digunakan akun *professional fees* untuk mengukur *audit fee* yang dikeluarkan perusahaan (Rizkiasih, 2010 dan Widiasari, 2009). Dalam persamaan, variabel ini disimbolkan dengan AF.

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Internal Audit*. Biasanya alat pengukuran *internal audit* menggunakan faktor ada tidaknya fungsi tersebut. Namun, sejak Bapepam mengeluarkan Peraturan Nomor IX.1.7 mengenai Unit Audit Internal dimana perusahaan publik wajib memiliki unit audit internal sehingga alat pengukuran tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi.

Internal Audit dalam penelitian ini yaitu jumlah laporan aktivitas yang diserahkan kepada Komite Audit untuk mengukur jumlah aktivitas yang dilaporkan kepada auditor. Variabel ini diproksikan pada jumlah rapat Komite Audit. Dalam persamaan, variabel ini disimbolkan dengan IA.

3.1.3 Variabel Intervening

Variabel intervening dalam penelitian ini adalah penerapan *Good Corporate Govenance* atau Tata Kelola Perusahaan yang baik. Variabel ini diwakili oleh peringkat dalam *Good Governance Perception Index* yang dikeluarkan IICG (*Indonesian Institute for Corporate Governance*) dan Majalah SWA sebagai media publikasi. Variabel ini menggunakan skala rating. Dalam persamaan, variabel ini disimbolkan CGPI.

Indeks yang digunakan untuk memberikan skor berupa angka mulai 0-100. Jika perusahaan memiliki skor mendekati 100 maka perusahaan tersebut semakin baik dalam menerapkan *good corporate governance*.

3.2 Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode sampel yang digunakan adalah *pursposive sampling* (dipilih berdasarkan kriteria tertentu dari pertimbangan peneliti). Metode ini dipilih dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria penarikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan yang termasuk dalam pelaksanaan survey CGPI yang dilaksanakan IICG tahun 2005-2008.
2. Saham perusahaan *listed* (terdaftar) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 1 Januari 2005 sampai 31 Desember 2008 dan tidak *delisting* selama periode penelitian.
3. Mencantumkan *professional fee* dan jumlah rapat Komite Audit dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan. Data sekunder ini diambil dari Annual Report (Laporan Tahunan) diunduh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI), majalah SWA, serta publikasi dari IICG..

Penggunaan data sekunder dikarenakan alasan :

1. Laporan keuangan yang sudah *dipublish* telah diaudit oleh akuntan publik sehingga informasinya dapat dipercaya
2. Survei yang dilakukan IICG telah dipublikasikan di majalah SWA dan website IICG
3. Mayoritas kantor pusat perusahaan berlokasi di Jakarta sedangkan penulis melakukan studi dan penelitian di Semarang sehingga apabila harus mengambil data langsung dari sumbernya akan menyita banyak waktu dan materi.
4. Lebih mudah dan lebih murah dalam memperoleh data

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan dari website dan sumber lainnya , lalu dilanjutkan dengan pencatatan, perekapan, kemudian penghitungan.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif didasarkan pada data yang telah dikumpulkan lalu dianalisis. Analisis ini digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian (Internal audit, *Good Corporate Governance*, dan *Audit fee*) yang dapat dilihat dari jumlah data, angka rata-rata, kisaran, dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen, variabel dependen atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Proses uji normalitas data dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) yaitu jika nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* tidak signifikan, maka semua data yang ada terdistribusi secara normal. Tetapi bila nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* signifikan maka semua data yang ada tidak terdistribusi tidak terdistribusi secara normal.

Uji K-S dilakukan dengan melihat angka probabilitasnya dengan ketentuan (Ghozali, 2005) :

1. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$; distribusi adalah tidak normal

2. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$; distribusi adalah normal

Selain uji K-S, juga diperhatikan penyebaran data (titik) pada *normal p-plot of regression standardized residual* dari variabel dependen, dimana :

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel independen saling berhubungan (berkorelasi) secara linier. Problem multikolinearitas terjadi apabila antara variabel-variabel independen terdapat hubungan yang signifikan. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya problem multikolinearitas adalah dengan memperhatikan :

1. Besaran korelasi antar variabel independen.

Pedoman suatu model regresi bebas multikolinearitas, mempunyai kriteria berikut :

- a. Koefisien korelasi antara variabel-variabel independen harus lemah, tidak lebih besar dari 90 % atau dibawah 0,90 (Ghozali, 2005)

- b. Jika korelasi kuat antara variabel independen dengan variabel-variabel lainnya (umumnya diatas 90% atau 0,90), maka hal tersebut menunjukkan terjadi multikolinearitas yang serius (Ghozali, 2005)

Selain itu, untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor). Pedoman pengambilan keputusan :

- a. Jika $VIF > 10$, maka variabel tersebut memiliki problem multikolinearitas
- b. Jika $VIF < 10$, maka variabel tersebut tidak memiliki problem multikolinearitas

3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik bersifat homokedastisitas dan tidak heterokedastisitas. Heterokedastisitas dapat dideteksi dengan melihat plot antara nilai taksiran dengan residual. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatter plot*. Ketentuan :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan masalah heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, , serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.5.2.4 Uji autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pegganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji autokorelasi dilakukan dengan Run test untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi.

3.6 Uji Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dapat dilakukan dengan cara analisis jalur (path analysis). Analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variable yang telah ditetapkan (Ghazali, 2006).

Gambar 3.1

Diagram path “Pengaruh *Internal Audit* Terhadap *Audit Fee* dengan Penerapan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Intervening”

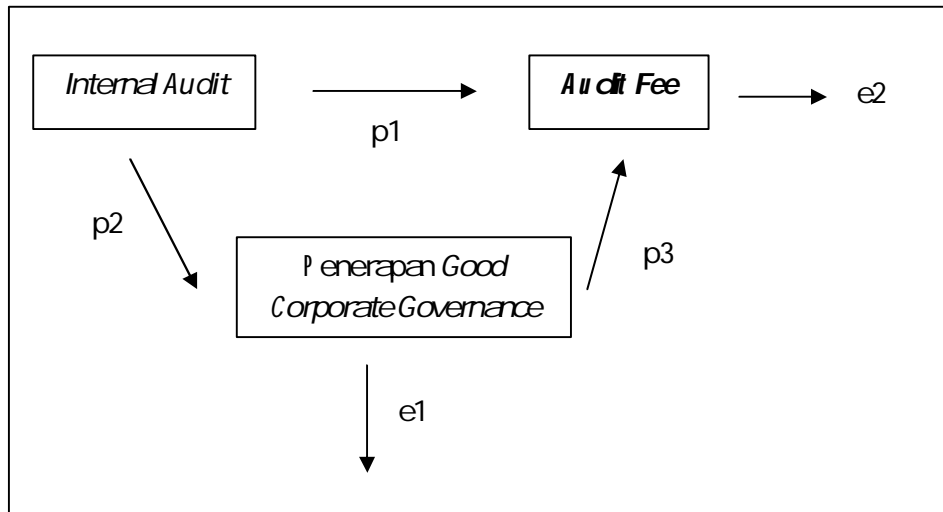


Diagram path diatas memberikan secara eksplisit hubungan kausalitas antar variable yang ditunjukkan oleh anak panah. Setiap nilai p menggambarkan jalur dan koefisien path. Nilai koefisien path dihitung dengan menggunakan analisis regresi. (Ghozali, 2006).

Persamaan regresi :

$$Y_{CGPI} = b_{IA}X_{IA} + e_1 \quad (3.1)$$

$$Y_{LNAF} = b_{IA}X_{IA} + b_{CGPI}X_{CGPI} + e_2 \quad (3.2)$$

Keterangan :

Y_{CGPI} = Penerapan Good Corporate Governance

Y_{LNAF} = Audit Fee

b_{IA} = Intercept Internal Audit

b_{GCG} = Intercept Penerapan GCG

e_1 = Residual Penerapan GCG

e_2 = Residual Audit Fee

Hipotesis bisa diterima bila hasil regresi menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05 ($p < 0,05$). Hipotesis ditolak jika hasil regresi menunjukkan hasil di atas 0,05 ($p > 0,05$) (Ghozali, 2006).